



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2019**



KATA PENGANTAR

Dalam upaya untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan selama tahun 2019 telah mendorong ditingkatkannya kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan ini diawali dengan adanya pelaksanaan tertib administrasi kependudukan sampai dengan tingkat lingkungan atau banjar, serta membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung serta untuk mempertanggung jawabkan tugas, wewenang dan sumber daya yang telah diberikan dibutuhkan suatu media pertanggung jawabkan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Laporan ini mengungkap seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tahun 2019 yang telah tertuang dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Beberapa indikator kinerja yang dilengkapi dengan bobotnya telah disajikan dalam laporan ini sebagai media untuk mengukur kinerja instansi. Dengan cara ini, diharapkan akan perlu diperbaiki dan yang mana perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam laporan ini juga mengungkap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas serta strategi-strategi yang diterapkan, baik berupa *output* maupun *outcomes*. Oleh karena itu, kami akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan kami untuk mendorong agar penyelenggaraan administrasi kependudukan yang mantap dengan berprinsip pada pembinaan tertib administrasi kependudukan yang berorientasi kepada hasil (Result Oriented Government).



Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2019 berarti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung telah dapat menyelesaikan kegiatannya. Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk tahun ini dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2019. Akhirnya, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja yang telah dicapai.

Denpasar, 03 Pebruari 2020
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa
Pembina Tk. I
NIP. 19651116 198703 1 006



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Iktisar Eksekutif.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi.....	2
1.3 Ruang Lingkup.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
2.1 Rencana strategis.....	5
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	7
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019	10
3.2 Analisis Capaian Kinerja tahun 2019	12
3.3 Akuntabilitas Keuangan	20
BAB IV PENUTUP	23
4.1 Kesimpulan	23
4.2 Saran.....	24
Lampiran : 1. Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU)	
2. Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019	
3. Piagam	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator kinerja utama	8
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja.....	9
Tabel 3.1	Pengukuran kinerja	11
Tabel 3.2	Analisis capaian sasaran meningkatnya mutu pelayanan administrasi Kependudukan... ..	13
Tabel 3.3	Program Pendukung Indikator, Pagu dan Realisasi	22



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Grafik perkembangan capaian kinerja kepemilikan KTP.....	14
Gambar3.2	Grafik perkembangan capaian kinerja kepemilikan Kartu Keluarga.....	15
Gambar 3.3	Grafik perkembangan capaian kinerja rasio bayi berakta kelahiran.....	16
Gambar 3.4	Grafik perkembangan capaian kinerja kepemilikan akta kelahiran.....	17
Gambar 3.5	Grafik perkembangan capaian kinerja rasio pasangan berakta nikah.....	18
Gambar 3.6	Grafik perkembangan capaian kinerja penduduk meninggal yang dilengkapi akta kematian.....	19
Gambar 3.7	Grafik pagu dan realisasi keuangan.....	21



IKTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diakhir masa RPJMD periode tahun 2016 - 2021 ini disusun, menyajikan capaian kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung periode tahun 2016 – 2021 yang dikaitkan dengan rencana startegis tahun 2019 dan rencana kinerja tahun 2019 yang telah dibuat sebelumnya.

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2019, terdapat tujuan dan sasaran strategik yang harus diwujudkan atau dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, yaitu :

a. Tujuan :

Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

b. Sasaran

1. Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

Untuk pencapaian sasaran tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dalam tahun 2019 telah menetapkan 7 (tujuh indikator) untuk mengukur keberhasilan ataupun kegagalan dari rencana kinerja yang telah ditetapkan. Sebagai gambaran, pencapaian kinerja dari hasil pengukuran kinerja tahun 2019, diperoleh hasil capaian dengan satuan Prosentase kisaran 100% - 105.32%, capaian kinerja dengan satuan rasio kisaran 1.15 – 1.39 sedangkan capaian dengan satuan indeks 111,58%. Ini berarti bahwa dari 7 (tujuh) indikator tersebut sudah tercapai. Hal ini tidak terlepas dari upaya – upaya yang telah dilakukan seperti diantaranya:

- Melaksanakan penyuluhan tentang arti pentingnya administrasi kependudukan;
- Melaksanakan pola pelayanan jemput bola sampai ditingkat Desa.



- TRC DAFDUK KTP –el yaitu sebuah tim reaksi cepat yang bertugas melakukan perekaman dan pemutahiran kk, keliling dari rumah ke rumah, ke banjar-banjar, desa/kelurahan, lapas, rumah sakit dan sekolah-sekolah.
- Melatih sumber daya manusia terutama yang bersentuhan dengan pelayanan agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas;

Didalam merealisasi langkah-langkah yang telah diambil dalam tahun 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dialokasikan dana APBD Kabupaten Badung sebesar Rp. 18.731.199.074,00,- yaitu untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pencapaian kinerja adalah sebesar Rp.5.836.724.935,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.683.870.321,- sedangkan sisanya berupa belanja penunjang sebesar Rp.2.672.451.036,- dan realisasi Rp.2.372.022.062,68,-.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah berupa suatu laporan yang kemudian diberi nama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) , berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Instansi Pemerintah.

Untuk memenuhi maksud tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 sebagai bentuk komitmen terhadap ketentuan perundang-undangan tata pemerintahan yang berlaku sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban atas mandat yang telah dipercayakan oleh masyarakat selama tahun 2019. Adapun tujuan indikator kinerja yang dimaksud adalah cakupan layanan administrasi kependudukan yang terlayani.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program/kegiatan serta keberhasilan maupun kegagalan yang telah dicapai pada periode tahun 2019.

Isu – isu strategis yang dihadapi yaitu mobilisasi penduduk yang cukup tinggi dan tidak diimbangi dengan pendataan penduduk yang memadai dapat berimplikasi penduduk liar yang sewaktu – waktu dapat mengganggu



ketertiban umum, kesadaran penduduk untuk melaporkan mutasi kependudukannya kepada aparat masih sangat rendah, sehingga berakibat tidak terkuratnya data penduduk dalam kondisi tertentu, masih ada beberapa masyarakat yang enggan untuk menyesuaikan dokumen kependudukannya dengan NIK Nasional sehingga akan mengalami kendala dalam penerapan e-KTP. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukannya tepat waktu seperti pencatatan kelahiran masih relatif rendah, sehingga dengan diberlakukannya Undang – undang No. 23 tentang administrasi kependudukan masih dirasa akan menjadi beban tersendiri didalam melengkapi diri dengan administrasi kependudukan.

1.2 Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah dan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tata kerja serta Tugas Pokok dan fungsi perangkat Daerah sehingga susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan
3. Tiga Bidang terdiri dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - a. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Seksi Identitas Penduduk
 - Seksi Pindah Datang Penduduk
 - Seksi Pendataan Penduduk



- b. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Seksi Kelahiran
 - Seksi Perkawinan dan Perceraian
 - Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan kematian
- c. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data .
 - Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 - Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

1.3. Ruang Lingkup.

Laporan kinerja tahun 2019 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Sistematika Penyusunan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Struktur Organisasi
- 1.3 Ruang Lingkup

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.3 Perjanjian Kinerja tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Pengukuran capaian kinerja tahun 2019
- 3.2 Analisis Capaian Kinerja
- 3.3 Akuntabilitas Keuangan



BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

Lampiran

- *Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU)*
- *Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019*
- *Piagam*



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dalam Laporan kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerjanya.

Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tahun 2016 – 2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan 5 (lima) tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan. Dan secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, maka visi yang hendak dicapai Kabupaten Badung sampai dengan tahun 2021 adalah :

**“ MEMANTAPKAN ARAH PEMBANGUNAN BADUNG
BERLANDASKAN TRI HITA KARANA MENUJU MASYARAKAT YANG
MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA “**



Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka perlu dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, dan tujuan yang ingin dicapai serta program yang akan dilaksanakan. Maka dapat dirumuskanlah misi pembangunan menengah Kabupaten Badung tahun 2016 -2021 adalah

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
2. **Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.**
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.
9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

Dimana misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung berada di misi nomor 2 (dua) dari misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung. Dapat dijabarkan tujuan, sasaran , strategi serta arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagai berikut :



a. Tujuan

Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik administrasi kependudukan dan catatan sipil

b. Sasaran

1. Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan.
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

c. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan strategi dan kebijakan. agar pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud bisa lebih terarah. Adapun strategi dan kebijakan dimaksud adalah :

- Strategi
 1. Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong terakomodasinya hak – hak dan perlindungan sosial penduduk.
 2. Peningkatan pelayanan kependudukan dan Pencatatan sipil dengan system informasi administrasi kependudukan (SIAK).
- Kebijakan
 - Penataan pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan.

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis suatu organisasi, dapat dilihat pada table 2.1 sebagai berikut :



Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2019

Tujuan	Sasaran	Indikator
1. Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1.Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan	1. Prosentase kepemilikan KTP 2. Prosentase kepemilikan kartu keluarga 3.Rasio bayi berakta kelahiran 4. Prosentase kepemilikan akta kelahiran 5.Rasio pasangan berakta nikah. 6.Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi akta kematian
	2.Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	1.Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dengan adanya perjanjian kinerja maka terwujudlah kesepakatan antaran pemberi dan peneriman amanah atas kinerja terukur tertentu sesuai tugas, fungsi dan wewenang memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Dokumen Perjanjian Kinerja mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan	1.Prosentase kepemilikan KTP	%	94%
		2.Prosentase kepemilikan kartu keluarga	%	98.75%
		3.Rasio bayi berakta kelahiran	Rasio	0.86
		4.Prosentase kepemilikan akta kelahiran	%	88%
		5.Rasio pasangan berakta nikah.	Rasio	0.41
		6.Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi akta kematian	%	100%
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	1.Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	Indeks	80



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung kedepan.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Perjanjian kinerja tahun 2019 terdapat 2 sasaran dan 7 indikator kinerja.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019

Laporan pengukuran capaian kinerja merupakan perbandingan antara target sasaran indikator kinerja dengan realisasi dimana untuk dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Badung, berdasarkan hasil pengukurannya dan target kinerja tahun 2019 tahun, dapat dilihat pada tabel :



Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Badung Tahun 2019 .

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4			5
1.	1. Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan	1. Prosentase kepemilikan KTP	%	94	97.68	103.91
		2. Prosentase Kepemilikan Kartu Keluarga	%	98.75	98.77	100.02
		3. Rasio bayi berakta kelahiran	Rasio	0.86	0.99	1.15
		4. Prosentase kepemilikan akta kelahiran	%	88	92.71	105.35
		5. Rasio Pasangan berakta nikah	Rasio	0.41	0.57	1.39
		6. Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi akta kelahiran	%	100	100	100
	2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	Indeks	80	89.27	111.58



Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target yang telah direncanakan dalam tahun 2019 ini telah dilakukan secara berkala setiap triwulan, sehingga sedini mungkin dapat diketahui pencapaian target dari masing-masing indikator.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis yang dilakukan atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2019 yang dilaporkan tahun 2020 , sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan. Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Analisis pencapaian sasaran dan indikator kinerja sebagai pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut.



Sasaran 1
Meningkatnya Mutu Pelayanan Administrasi Kependudukan

Tabel.3.2
Analisis Capaian Sasaran
Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan

No	Indikator Kinerja	satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019
			Target	realisasi		Target	realisasi	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Prosentase Kepemilikan KTP	%	91	93	102.20	94	97.68	103.91
2	Prosentase Kepemilikan Kartu Keluarga	%	98.50	100	101.52	98.75	98.77	100.02
3	Rasio bayi berakta kelahiran	Rasio	0.82	0.97	1.18	0.86	0.99	1.15
4	Prosentase kepemilikan akta kelahiran	%	87	97.48	112.05	88	92.71	105.35
5	Rasio Pasangan berakta nikah	Rasio	0.39	0.34	0.87	0.41	0.57	1.39
6	Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi dengan akta kematian	%	100	100	100	100	100	100

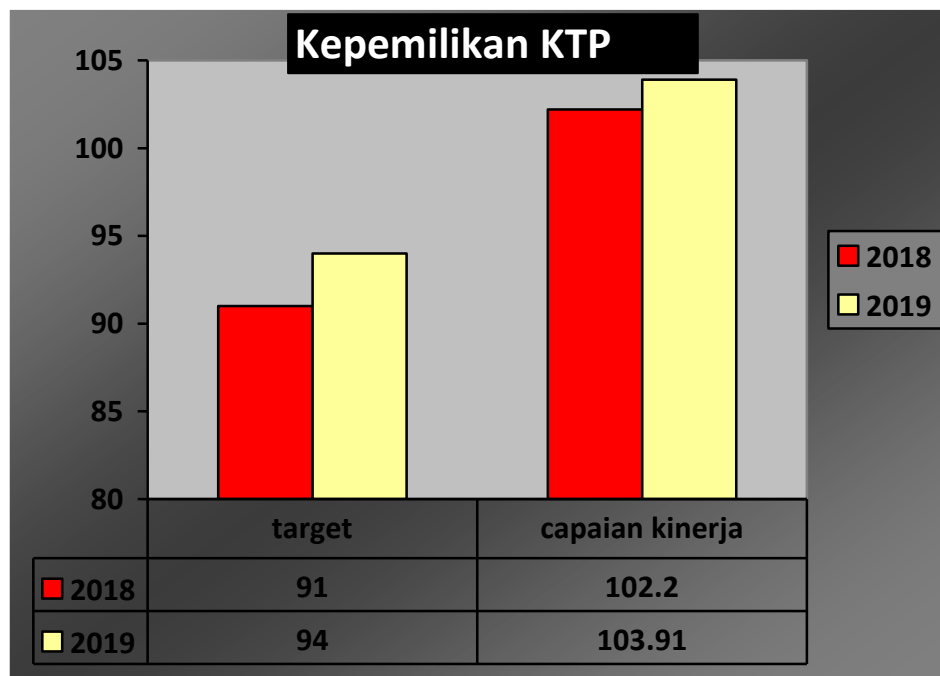
Berdasarkan tabel 3.2 analisa capaian sasaran yaitu meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan dari masing – masing indikator telah tercapai target dari target yang telah ditetapkan.



Indikator 1, Prosentase Kepemilikan KTP

Pada konsepnya yang memiliki KTP adalah orang yang telah berusia 17 tahun keatas atau yang telah pernah menikah yaitu sebagai identitas diri bagi penduduk yang telah dewasa. Tahun 2019 terealisasi sebesar 97.68% dari target yang ditetapkan sebesar 94% sehingga capaian kinerja 103.91% Tercapainya kinerja Indikator prosentase kepemilikan KTP tahun 2019 disebabkan antusiasnya masyarakat untuk melakukan perekaman e-KTP . Inovasi yang dilaksanakan adalah TRC DAFDUK KTP –el yaitu sebuah tim reaksi cepat yang bertugas melakukan perekaman dan pemutahiran kk, keliling dari rumah ke rumah, ke banjar-banjar, desa/kelurahan, lapas, rumah sakit dan sekolah-sekolah.

Gambar 3.1
Grafik Perkembangan capaian kinerja kepemilikan KTP
tahun 2018 -2019

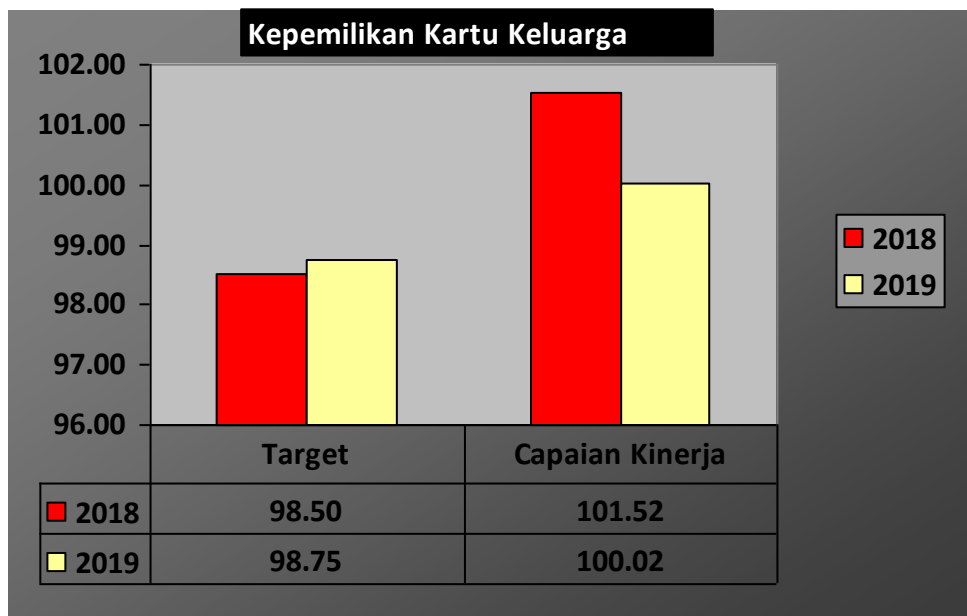




Indikator 2, Kepemilikan Kartu Keluarga

Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkannya susunan keluarga kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Desa / Lurah dan Camat, sehingga pelaporan itu sebagai dasar penerbitan Kartu Keluarga. Tahun 2019 realisasi kepemilikan kartu keluarga sebesar 98.77% dari target yang ditetapkan 98.75% , sehingga capaian kinerja 100.02%.

Gambar 3.2
Grafik Perkembangan Capaian Kinerja
Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2018 – 2019

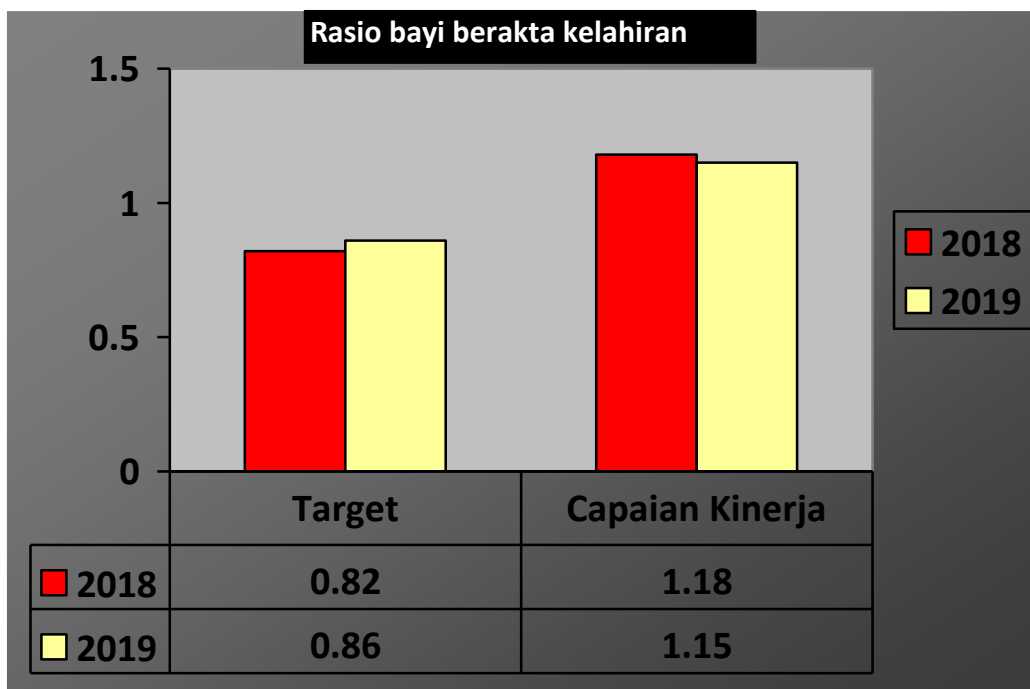




**Indikator 3,
Rasio Bayi Berakta Kelahiran**

Tahun 2019 rasio bayi berakta kelahiran terealisasi 0.86 dari target 0.99 dan capaian kinerja 1.15. Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat untuk memiliki akta kelahiran sangat baik dan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengadakan jemput bola dan sosialisasi tentang arti pentingnya akta kelahiran untuk kepengurusan sekolah dan administrasi lainnya.

Gambar 3.3
Grafik Perkembangan Capaian Kinerja
Rasio bayi berakta kelahiran
Tahun 2018 – 2019

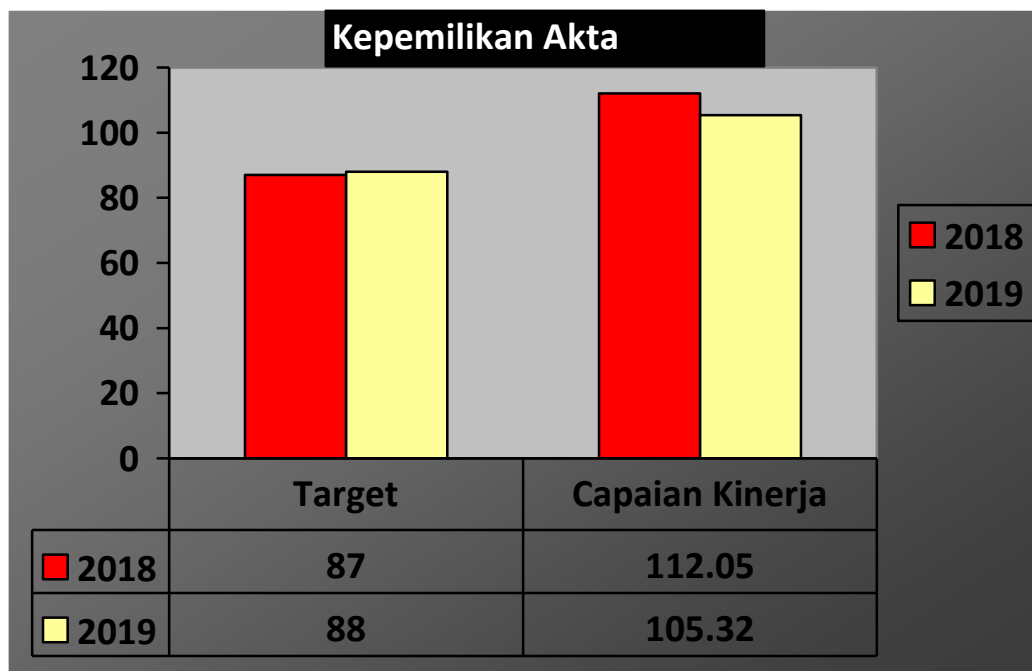




Indikator 4, Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Dalam akta kelahiran berisi tentang nama orang tua yang bersangkutan, apabila seorang ibu melahirkan tanpa ayah maka dilampirkan nama ibunya saja. Dalam tahun 2019 prosentase kepemilikan akta kelahiran terealisasi 92.71% dari target 88% sehingga capaian kinerja 105.32%. Saat ini pelayanan pendaftaran penduduk sudah terintegrasi dalam pelayanan “BADUNG AKU SAPA”, yakni Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah dan cepat dimana masyarakat yang mengalami peristiwa penting seperti kelahiran, cukup dengan sekali pemberkasan akan memperoleh akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu identitas anak, melalui pelayanan “3 in 1”.

Gambar 3.4
Grafik Perkembangan Capaian Kinerja
Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2018 – 2019

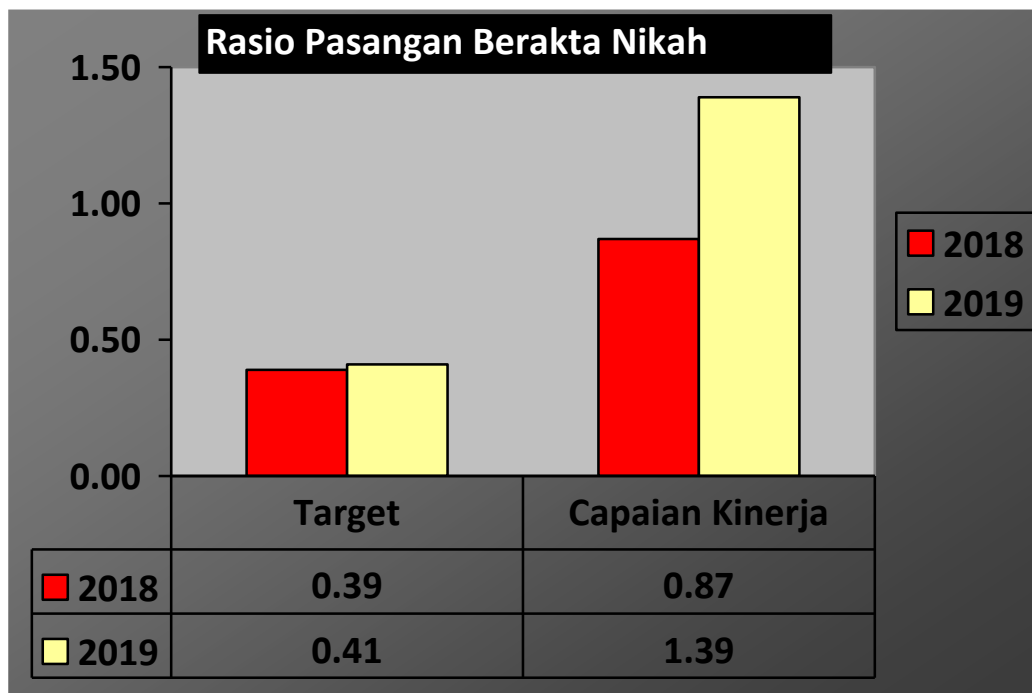




**Indikator 5,
Rasio Pasangan yang berakta Nikah**

Dalam tahun 2019 rasio pasangan berakta nikah realisasi 0.57 dari target 0.41 dan capaian kinerja 1.39, hal ini diakibatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus akta perkawinannya sangat tinggi. Inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung selain pelayanan jemput bola adalah pelayanan “BADUNG AKU SAPA”, 3 in 1. Masyarakat yang mengalami peristiwa perkawinan cukup dengan sekali pemberkasan memperoleh akta perkawinan kartu keluarga dan ktp-el.

Gambar 3.5
Grafik Perkembangan Capaian Kinerja
Rasio pasangan berakta nikah Tahun 2018 – 2019





Indikator 6, Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi akta kematian

Akta kematian untuk tahun kedepan menjadi persyaratan penting dalam mengurus dokumen terkait dengan persoalan ahli waris, artinya agar mempermudah urusan administrasi bagi keluarga yang ditinggalkan. Dalam tahun 2019 dirancang 100% realisasi 100% capaian kinerja 100%. Hal ini disebabkan ada kebijakan dari kepala Daerah Kabupaten Badung untuk memberikan santunan kepada penduduk yang meninggal dengan syarat melaporkan kematian tepat waktu. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung juga memberikan pelayanan yang mudah dan cepat dalam pengurusan akta kematian yaitu melalui pelayanan “BADUNG AKU SAPA”, masyarakat yang mengalami peristiwa kematian akan mendapatkan akta kematian, santunan dan kartu keluarga cukup dengan sekali pemberkasan melalui pelayanan “3 in 1”.

Gambar 3.6
Grafik Perkembangan Capaian Kinerja
Penduduk Meninggal yang Dilengkapi dengan Akta Kematian





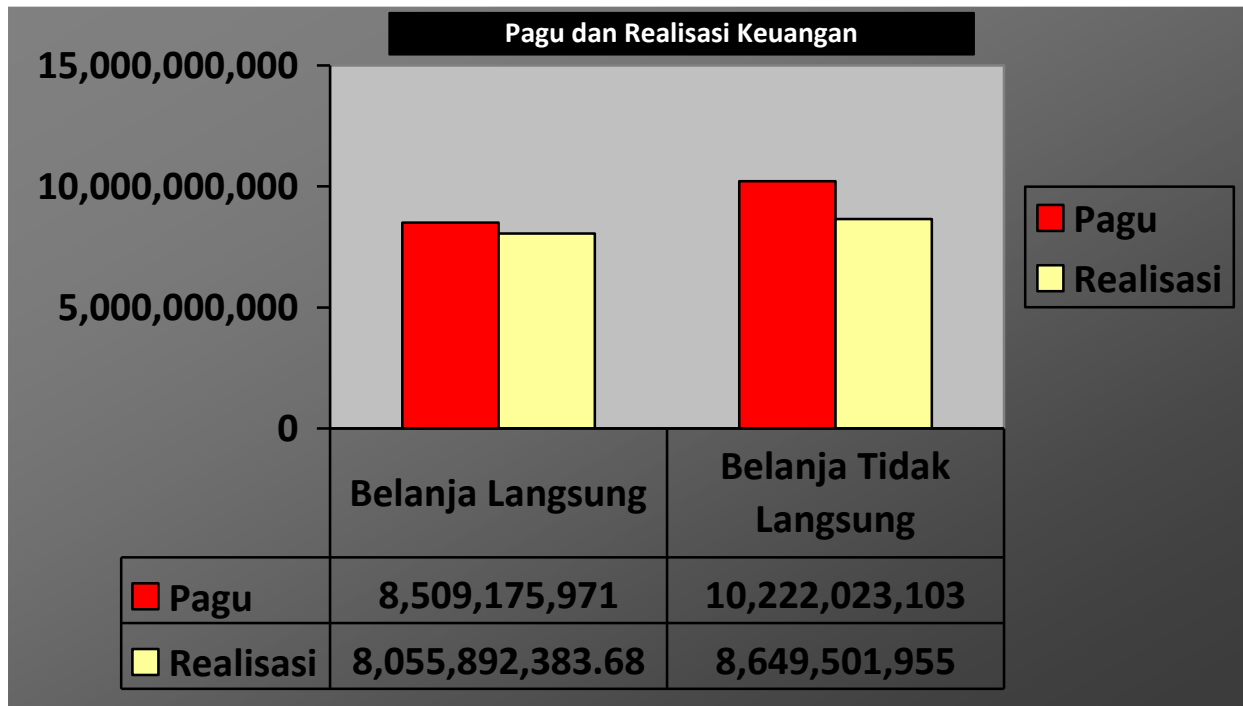
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tahun 2019 mengelola anggaran yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Badung sebesar Rp. 18.731.199.074,00,- terdiri dari:

1. Belanja Langsung : Rp. 8.509.175.971,00,-
 - Belanja Pegawai
 - Pagu : Rp. 320.152.200,00 ,-
 - Realisasi : Rp. 305.902.200,00 ,- (95,55%)
 - Belanja Barang dan jasa
 - Pagu : Rp. 7.961.339.471,00,-
 - Realisasi : Rp. 7.523.232.880,00,- (94,50%)
 - Belanja Modal
 - Pagu : Rp. 227.684.300,00 ,-
 - Realisasi : Rp. 226.757.303,68,- (99,59 %)
2. Belanja Tidak Langsung : Rp. 10.222.023.103,00,-
 - Belanja Pegawai
 - Pagu : Rp. 10.222.023.103,00,-
 - Realisasi : Rp. 8.649.501.955,- (84,62 %)



Gambar 3.7
Grafik Pagu dan Realisasi Keuangan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KabupatenBadung



Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama dapat dibiayai dengan anggaran tersebut diatas, dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 3.3
Program Pendukung Indikator, Pagu dan Realisasi
Tahun 2019.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target /Satuan	Program Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Pagu	Realisasi				
1	1.Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan	1.Prosentase kepemilikan KTP	94%	1. Program penataan administrasi kependudukan 2. Program pelayanan administrasi perkantoran 3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan 3.Program perencanaan dan penganggaran SKPD	14	5.836.724.935	5.683.870.321				
		2.Prosentase Kepemilikan Kartu Keluarga	98.75%								
3.Rasio bayi berakta kelahiran		0.86									
4.Prosentase kepemilikan akta kelahiran		88%									
5.Rasio Pasangan berakta nikah		0.41									
6.Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi dengan akta kematian		100%									
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan		1. Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	80					1. Program penataan administrasi kependudukan 2. Program pelayanan administrasi perkantoran 3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan 3.Program perencanaan dan penganggaran SKPD	16	1.816.400.472	1.549.749.766

Program prioritas untuk mencapai Indikator Kinerja Utama yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan sedangkan program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan program perencanaan dan penganggaran SKPD merupakan program pendukung terhadap pencapaian kinerja untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis tujuan sasaran yang ingin dicapai dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien, melalui 7 indikator yang telah ditetapkan dapat disimpulkan 6 (enam) indikator tercapai capaian kinerja :

1. Prosentase kepemilikan KTP capaian kinerja 103.91%
2. Prosentase kepemilikan kartu keluarga capaian kinerja 100.02
3. Rasio bayi berakta kelahiran capaian kinerja 1.15
4. Prosentase kepemilikan akta kelahiran capaian kinerja 92.71%
5. Rasio pasangan berakta nikah capaian kinerja 1.39
6. Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi akta kematian capaian kinerja 100%

Dalam melakukan pengukuran kinerja keberhasilan dalam pencapaian target ditunjang oleh kerjasama, komunikasi, koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf, begitu pula antar bidang – bidang, serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait termasuk dengan kecamatan.



4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas perlu diupayakan terobosan- terobosan baru untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

Mangupura, 03 Pebruari 2020
Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Badung

Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa
Pembina Tk. I
NIP. 19651116 198703 1 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Unit Organisasi /SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
2. Tugas : Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang kependudukan dan Pencatatan sipil
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang kependudukan dan Pencatatan sipil
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan Pencatatan sipil
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang kependudukan dan Pencatatan sipil
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran /Utama	Formula	Penanggungjawab
1 Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik administrasi kependudukan dan catatan sipil	1 cakupan layanan administrasi kependudukan yang terlayani	Prosentase kepatuhan administrasi kependudukan dan catatan sipil	100%	1 Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan	1 Prosentase Kepemilikan KTP	$\frac{\text{Jumlah KTP yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100\%$	Bid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
					2 Posentase Kepemilikan Kartu Keluarga	$\frac{\text{Jumlah KK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk yang wajib KK}} \times 100\%$	Bid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
					3 Rasio bayi berakta kelahiran	$\frac{\text{Jumlah bayi lahir dan memperoleh akta kelahiran ditahun bersangkutan}}{\text{Jumlah bayi lahir ditahun bersangkutan}}$	Bid Pelayanan Pencatatan Sipil

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran /Utama	Formula	Penanggungjawab
					4 Prosentase kepemilikan akta kelahiran	$\frac{\text{Jumlah akta yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk wajib akta kelahiran}} \times 100\%$	Bid Pelayanan Pencatatan Sipil
					5 Rasio pasangan berakta nikah	$\frac{\text{Jumlah akta nikah yang diterbitkan}}{\text{Jumlah pasangan yang menikah}}$	Bid Pelayanan Pencatatan Sipil
					6 Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi akta kematian	$\frac{\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk meninggal}} \times 100\%$	Bid Pelayanan Pencatatan Sipil
				2 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	Rata - rata nilai SKM pelayanan	Sekretariat

**Pengukuran Capaian Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Badung Tahun 2019 .**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4			5
1.	1. Meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan	1. Prosentase kepemilikan KTP	%	94	97.68	103.91
		2. Prosentase Kepemilikan Kartu Keluarga	%	98.75	98.77	100.02
		3. Rasio bayi berakta kelahiran	Rasio	0.86	0.99	1.15
		4. Prosentase kepemilikan akta kelahiran	%	88	92.71	105.35
		5. Rasio Pasangan berakta nikah	Rasio	0.41	0.57	1.39
		6. Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi akta kelahiran	%	100	100	100
	2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	Indeks	80	89.27	111.58



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia

Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada

**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Badung**

Sebagai

**Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik
Kategori "Sangat Baik"
Tahun 2019**



Jakarta, 22 November 2019



Tjahjo Kumolo